

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Anderson W.H). Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Non Migas Lainnya yakni 63,91%, atau sebesar Rp 63,73 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 38,88 miliar. Pertumbuhan tertinggi kedua dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 27,63%, atau sebesar Rp 4,225 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 3,310 triliun. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 81,03% dari target yang ditetapkan di tahun 2015. Pertumbuhan yang tinggi ini salah satunya dipicu oleh tingginya pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) buah dari keberhasilan deterrent effect penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (gijzeling) wajib pajak (Pajak.go.id, 2015).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Di Negara maju dan Negara berkembang kepatuhan pajak menjadi masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh pajak maka akan menimbulkan keinginan melakukan tindakan pengelakan, penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Untuk dapat mengidentifikasi adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, selain itu dapat dilihat dari penyeteroran kembali surat pemberitahuan.

Menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.28 Tahun 2007, "Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan". Menurut Anti (2014) surat setoran pajak dibedakan menjadi SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan.

Pembayaran STP merupakan jumlah pembayaran atas sejumlah tunggakan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi jika tunggakan pajak tersebut dapat dicairkan oleh wajib pajak orang pribadi ke kantor pajak (Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas 2013: 64). Semakin besar pencairan tunggakan pajak, semakin besar pula penerimaan pajak (Fitriani, 2009).

Peningkatan pencairan tunggakan pajak secara umum dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Waluyo, 2010).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik seperti jalan raya, halte, penerangan umum dan sebagainya. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia (Aisyah, 2013).

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut dengan kekuatan hukum yang memaksa berupa peraturan perundangundangan, pencairan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini, penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak, adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak (Sari, 2013:264).

Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya Jumlah Wajib Pajak khususnya orang pribadi yang melaporkan SPT masa atau tahunannya, tentunya akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Mardiasmo, 2011). Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan

pendeteksian penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menaikkan pendapatan perkapita perorangan.

Atas dasar research and gap dari hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan meneliti kembali **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Setoran Pajak dan Pembayaran STP terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto?
2. Apakah jumlah setoran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto?
3. Apakah pencairan tunggakan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijadikan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat jumlah setoran pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembayaran STP terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian, penulis berharap agar hasil yang di peroleh dapat berguna bagi :

1) Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai informasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi khususnya bagi mahasiswa di kalangan fakultas ekonomi dan bisnis

2) Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi akademisi yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

3) Aspek Praktis

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak memiliki fungsi penting yaitu pertama fungsi pajak sebagai *budgetair*, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan. Selain itu, pajak sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu (Mardiasmo, 2011).

2.1.2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Waluyo (2011) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus membayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

2.1.3. Pengertian Wajib Pajak

Dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

2.1.4. Jenis-jenis Surat Pajak

1. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Sistem pajak di Indonesia menganut system *self assessment*, yaitu Wajib Pajak di beri kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan

sendiri jumlah pajak yang terhutang, melalui Surat Pemberitahuan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak tersebut terdaftar sehingga SPT merupakan salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan dalam Administrasi Perpajakan.

Menurut Resmi (2011) Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan.

Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan yang di gunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan takwim. Macam-macam SPT Masa yaitu : SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa Pasal 23, SPT Masa Pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPN.

Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan yang di gunakan untuk pelaporan tahunan atau Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak,. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

2. Surat Setoran Pajak

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang

dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Menurut Resmi (2011:31), Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

3. Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.1.5. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan formal adalah kepatuhan terhadap aturan formal perpajakan. Diantaranya kepatuhan formal Wajib Pajak adalah

- mendaftarkan diri dan memiliki NPWP,
- menghitung dan membayar pajak terutang,
- melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

2.1.5.1 Jenis-Jenis Kepatuhan

Tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa. Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.5.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan UU KUP Pasal 17C wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.6. Jumlah Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2011). Surat setoran pajak ini

berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

2.1.7. Tunggakan Pajak

Pajak yang terutang harus dibayar tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di kas negara atau kantor-kantor yang ditunjuk pemerintah. Untuk memperingan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Resmi, 2013:40).

2.1.7.1. Pembayaran STP

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

2.1.7.2. Mekanisme Melunasi STP

Pelunasan STP harus dilakukan Wajib Pajak dengan membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Anda wajib mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada bagian Nomor Ketetapan. Sebab jika lupa mencantumkan nomor STP ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan nantinya, karena Wajib Pajak bisa dianggap belum membayar STP tersebut. Jika masalah ini terjadi, Wajib Pajak harus menyelesaikan melalui proses pemindahbukuan yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

2.1.8. Penerimaan Pajak

Peran sektor pajak sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak (DJP) salah satu institusi pemerintah dibawah kementerian keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari Tahun ke Tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

2.1.8.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Pengertian dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah penerimaan pajak dalam negeri yang dikenakan pada subjek pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.1.8.2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPh, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar

Persyaratan subjektif adalah persyaratan mengenai pemenuhan sebagai subjek pajak dalam UU PPh. Persyaratan objektif adalah persyaratan pemenuhan adanya penerimaan atau perolehan objek pajak penghasilan menurut UU PPh.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan

sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP).

2.1.8.3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Wajib Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : undang-undang no.36 tahun 2008

2.1.8.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat.

Selengkapnya perubahan PTKP ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Penghasilan Tidak Kena Pajak

	PTKP 2016
TK, Lajang (tidak menikah)	Rp. 54.000.000,-
TK1, Lajang dengan 1 tanggungan	Rp. 58.500.000,-

TK2, Lajang dengan 2 tanggungan	Rp. 63.000.000,-
TK3, Lajang dengan 3 tanggungan	Rp. 67.500.000,-
K, Menikah tanpa tanggungan	Rp. 58.500.000,-
K1, Menikah dengan tanggungan	Rp. 63.000.000,-
K2, Menikah dengan 2 tanggungan	Rp. 67.500.000,-
K3, Menikah dengan 3 tanggungan	Rp. 72.000.000,-

Sumber : pajak.go.id

2.1.9 Jumlah Wajib Pajak

Pada tahun 2013 diharapkan *tax ratio* jumlah wajib pajak meningkat menjadi 14 % dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak hingga mencapai minimal 30 juta, dengan tingkat kepatuhan rata-rata 70 persen. Jumlah itu terdiri atas 19,8 juta wajib pajak orang pribadi dan 2,2 juta wajib pajak badan, dengan tingkat kepatuhan 52,74 persen, atau hanya sekira 9,33 juta wajib pajak dari 17,69 juta wajib pajak yang terdaftar (Fitra, 2012).

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan variabel yang berbeda-beda dalam menganalisis pengaruh terhadap penerimaan pajak. Berikut ringkasan hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3.
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Qumairoh (2016)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015)	Variabel Independen - Kepatuhan wajib pajak - Jumlah wajib pajak - Jumlah surat setoran pajak Variabel Dependen - Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak dan jumlah surat setoran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2	Mannaki (2016)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Variabel Independen - Jumlah wajib pajak - Pencairan tunggakan pajak	Hasil penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak dan pencairan tunggakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak

		Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Periode 2013-2015)	Variabel Dependen - Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	penghasilan orang pribadi
3	Patimah (2016)	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2013-2015)	Variabel Independen - Penagihan pajak - Pencairan tunggakan pajak Variabel Dependen - Penerimaan pajak	Hasil penelitian menunjukkan variabel penagihan pajak dan pencairan tunggakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4	Warihanti (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang	Variabel Independen - Kesadaran wajib pajak - Sosialisasi perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan Variabel Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak dikeluarkan dari model penelitian

		Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pajak - Jumlah wajib pajak - Jumlah surat setoran pajak - Ekstensifikasi wajib pajak - Kepatuhan wajib pajak - Intensifikasi pajak <p>Variabel</p> <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 	karena tidak memenuhi kriteria. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak, jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
--	--	---	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000, batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat

tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti.

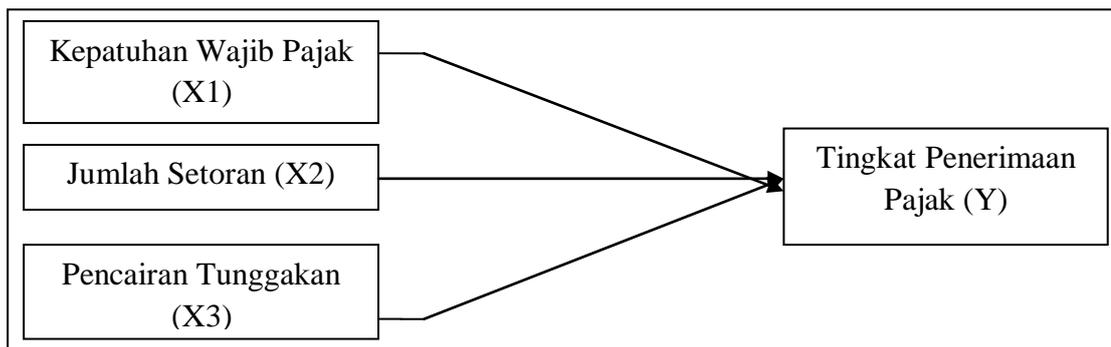
2. Pengaruh Jumlah Surat Setoran Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Jumlah surat setoran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Semakin banyak jumlah surat setoran maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak.

3. Pengaruh Pencairan Tunggakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak atas kewajiban pajaknya, beserta dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kelalaian penanggung pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Semakin besar pencairan tunggakan pajak, semakin besar pula penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Fitriani, 2009).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- Hipotesis 2 : Jumlah Surat Setoran berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- Hipotesis 3 : Pembayaran STP berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif kuantitatif yang menghubungkan antara variabel, dengan tujuan menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel yang diteliti. Menurut Indriantoro (2002) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan jumlah Wajib Pajak berupa jumlah WPOP lapor SPT, Data Jumlah Surat Setoran Pajak, data laporan Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak dan Data Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi KPP Surabaya Simokerto.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang diharapkan memiliki karakteristik yang dapat mewakili populasinya (Sekaran, 2009). Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode *non probability sampling* dengan pemilihan sampel bertujuan atau *purposive sampling*. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 2007) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan

Jadi proses memilih sejumlah sampel n dari populasi N yang dilakukan secara pertimbangan atau kriteria tertentu :

1. Laporan jumlah wajib pajak orang pribadi lapor SPT di KPP Surabaya Simokerto setiap bulannya Tahun 2014-2016.
2. Jumlah surat setoran pajak di KPP Surabaya Simokerto setiap bulannya Tahun 2014-2016.
3. Laporan pembayaran STP di KPP Surabaya Simokerto setiap bulannya Tahun 2014-2016.
4. Laporan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Surabaya Simokerto setiap bulannya Tahun 2014-2016.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel yang di dapat dari KPP Surabaya Simokerto setiap bulannya Tahun 2014-2016.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Setoran dan Pencairan Tunggakan serta variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut:

3.3.1. Variabel Independen (X)

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Menurut Simon James et al (2005) dalam Anggraeni *et al.* (2013) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan wajib pajak orang pribadi yang membayar.

2. Jumlah Surat Setoran Pajak (X2)

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,2011).

3. Pencairan Tunggakan Pajak (X3)

Menurut Waluyo dan Ilyas Wirawan B, (2003) pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran atas tunggakan pajak yang terjadi karena pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak, pemindahbukuan, pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan, pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan, dan penghapusan piutang.

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tidak bebas adalah jumlah penerimaan pajak Penghasilan. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi diukur dengan jumlah realisasi penerimaan pajak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sarwono (2006) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Studi dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan laporan-laporan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
2. Sedangkan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh.

3.5 Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (Effendi, 2000). Data primer yang diperoleh langsung penulis dalam penelitian ini adalah data laporan jumlah Wajib Pajak berupa jumlah WPOP lapor SPT, Data Jumlah Surat Setoran Pajak, data laporan Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak dan Data Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi KPP Surabaya Simokerto Pada Tahun 2015-2016.

3.6 Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.6.2. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Setoran dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Sugiyono (2011: 277) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)". Analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan

a = Bilangan Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien masing-masing variabel X_1 , X_2 , X_3

X_1 = Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak

X_2 = Jumlah Setoran Pajak

X_3 = Pencairan Tunggakan Pajak

e = Eror

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji kelayakan model regresi yang digunakan, harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Terdapat empat jenis pengujian pada uji asumsi klasik ini, diantaranya:

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Jika $D_{hitung} < D_{tabel}$ maka tidak ada alasan untuk menggunakan data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Dengan pendekatan grafik :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

B. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinieritas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Santoso, 2012). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran Variance Inflation Factor regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka

tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu observasi ke observasi yang lain, apabila kesalahan atau residual dari metode yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya artinya setiap observasi mempunyai realibilitas yang berbeda akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glajser.

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

- a. Dengan kriteria jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.
- b. Dengan kriteria jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi heterokedastisitas.

D. Uji Autokorelasi

Uji Autikorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $(t-1)$ dalam model regresi. Jika terdapat korelasi maka model tersebut mengalami masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut Widarjono (2013), Uji *Durbin Watson* adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai *Durbin Watson* hitung terletak di daerah tidak ada autokorelasi positif dan negatif. *DW test* dilakukan dengan cara membandingkan nilai *DW* hitung (d) dengan nilai dL dan dU pada tabel *Durbin-Watson*. Tabel 3.3 menjelaskan mengenai *rule of thumb* dari *DW test*.

TABEL 3.3 UJI STATISTIK *DURBIN WATSON D*

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < dL$	Ada Autokorelasi Positif
$dL < d < dU$	Tidak Dapat Diputuskan
$dL < 4-d < dU$	Tidak Ada Autokorelasi
$4-d < d < 4-dL$	Tidak Dapat Diputuskan
$4-dL < d < 4$	Ada Autokorelasi Negatif

3.6.4 Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan pengujian terhadap variabel model linier berganda dengan menggunakan uji koefisien determinasi, statistik uji-f dan

statistik uji-t . Dalam analisis regresi berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, juga menunjukkan arah pengaruh tersebut.

Menurut Ghozali (2006) uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan apabila nilainya mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya.

A. Uji F (Simultan)

Uji-f dilakukan untuk menguji kemampuan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependennya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) ini berarti bahwa secara bersama-sama kedua variabel tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan) ini berarti bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

B. Uji t (Parsial)

Uji statistik-t dilakukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (alpha 5%) penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan) ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto didirikan berdasarkan peraturan menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009.

4.2 Data Penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, wajib pajak yang membayar dan yang terdaftar, jumlah piutang dan jumlah tunggakan yang di bayar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto.

1. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Surabaya Simokerto
Perkembangan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 tahun pada KPP Pratama Surabaya Simokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2014-2016

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio
2014	219.755.868.000	230.417.792.000	104,85%
2015	345.241.699.000	304.315.570.000	88,14%
2016	471.349.193.000	312.419.352.000	66,28%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto

Persentase realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto pada tahun 2014 melebihi target yang sudah direncanakan, tetapi pada tahun 2015 dan 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan, persentase tertinggi terjadi pada tahun

2014 sebesar 104,85% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 66,28%. Rata-rata persentase realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto sebesar 86,42%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto masuk ke dalam kriteria sangat tinggi.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2014-2016

Tahun	WPOP yang terdaftar	WPOP yang membayar	Rasio
2014	8.448	3.731	44,17%
2015	8.891	3.789	42,62%
2016	8.803	4.046	45,96%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto

Persentase yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 45,96% dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 42,62%. Rata-rata persentase wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto yang membayar pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 44,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto masuk ke dalam kriteria rendah.

3. Pencairan tunggakan wajib pajak orang pribadi yang membayar di KPP Surabaya Simokerto

Tabel 4.3 Jumlah piutang WPOP dan jumlah tunggakan yang dibayar di KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2014-2016

Tahun	jumlah piutang WPOP pajak	jumlah tunggakan yang dibayar	Rasio
2014	7.591.310.000	7.309.040.000	96,28%
2015	15.263.400.000	15.258.480.000	99,97%
2016	12.142.120.000	11.826.440.000	97,40%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto

Persentase jumlah tunggakan pajak yang dibayar dibandingkan dengan jumlah piutang WPOP pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto cenderung tidak tetap setiap tahunnya berubah-ubah, pada tahun 2015 merupakan persentase yang lebih tinggi sebesar 99,97% dan pada tahun 2014 merupakan persentase lebih rendah sebesar 96,28%. Rata-rata persentase di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokero adalah sebesar 97,88%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencairan tunggakan pajak di Kantor

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian digunakan ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum atas variabel penelitian mengenai rata – rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2013).

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak	36	98.00	674.00	321.2778	163.85370
Setoran Pajak	36	1596.00	8605.00	5255.1389	1869.41861
Pencairan Tunggakan	36	236	1743	955.39	364.675
Penerimaan Pajak	36	12203	32587	23532.02	5125.003
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Output SPSS, 2017

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.4 menunjukkan *mean* tingkat kepatuhan pajak dari WPOP yang membayar sebesar 321.2778 dan standar

deviasi sebesar 163.85370, nilai minimum sebesar 98 dan maximum sebesar 674. Yang berarti bahwa rata-rata terdapat 321.2778 wajib pajak orang pribadi yang membayar di KPP Simokerto Surabaya periode 2014-2016.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan jumlah *mean* setoran pajak yang diprosikan dengan surat setoran pajak sebesar 5255.1389 dari seluruh observasi dan standar deviasi sebesar 1869.41861, nilai minimum sebesar 1.596 dan maksimum sebesar 8.605. Berarti bahwa rata-rata realisasi surat setoran pajak untuk KPP Surabaya Simokerto periode 2014-2015 adalah 5255.1389.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan *mean* pencairan tunggakan sebesar 955.39 dan standar deviasi sebesar 364.675, nilai minimum sebesar 236 dan maksimum sebesar 1.743. Hal ini berarti realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Surabaya Simokerto periode 2014-2015 adalah 955.39.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan *mean* penerimaan pajak sebesar 23532.02 dari penerimaan yang berarti rata-rata penerimaan pajak Orang pribadi dalam sampel penelitian ini adalah sebesar 23532.02. Kemudian nilai standar deviasi sebesar 5125.003, nilai minimum sebesar 12.203 dan maksimum sebesar 32587.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini ada 4 yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Dari hasil pengujian ini akan dapat dilihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini lolos kualifikasi sehingga dapat dilanjutkan

untuk perhitungan regresi. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS 17.0 for Windows)*.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *kolmogrov smirnov* dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*)

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.99042979E3
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.093
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.571
Asymp. Sig. (2-tailed)		.901

Sumber : Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.901 > 0.05$ yang berarti data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal).

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikoleniaritas dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel independen atau lebih (Ghozali, 2013). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui terjadinya korelasi antar variabel – variabel independen dalam penelitian. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi hubungan linear yang nyata (korelasi) antar variabel independen, dapat dilihat dari nilai *Value Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11089.868	1717.857		6.456	.000		
Kepatuhan Pajak	.745	3.695	.024	.201	.842	.762	1.312
Setoran Pajak	1.358	.433	.495	3.134	.004	.426	2.349
Pencairan Tunggakan	5.302	2.013	.377	2.633	.013	.518	1.929

Sumber : Output SPSS, 2017

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai VIF kepatuhan pajak sebesar 1.312 < 10 dan nilai *tolerance* variabel sebesar 0.762 > 0,10, nilai *tolerance* setoran pajak 0,426 > 0,10 dan VIF 2.349 < 10.0 dan nilai *tolerance* pencairan tunggakan 0.518 > 0,10 dan VIF 1.929 < 10.0. Hal ini berarti bahwa diantara variabel independen didalam penelitian ini tidak terjadi hubungan atau tidak memiliki hubungan satu sama

lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mencari bahwa data tersebut bebas dari heterokedastisitas atau tidak yaitu variasi nilai yang tidak konstan. Uji statistik yang digunakan adalah dengan uji *glejser* melalui regresi nilai *absolute residual* dengan variabel independennya. Nilai *sig* dibandingkan dengan nilai α yaitu 0.05. Hasil uji *glejser* adalah sebagai berikut

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2970.708	1069.456		2.778	.009
	Kepatuhan Pajak	.903	2.301	.078	.392	.697
	Setoran Pajak	-.211	.270	-.209	-.782	.440
	Pencairan Tunggakan	.141	1.253	.027	.112	.911

Sumber : Output SPSS, 2017

Dari hasil pengujian diperoleh nilai perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan level *sig* > α yaitu 0.05. Nilai signifikan variabel kepatuhan pajak sebesar 0.697, variabel setoran pajak sebesar 0.440 dan nilai variabel pencairan tunggakan sebesar 911. Maka dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW).

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 ^a	.660	.628	3127.466	1.306

Sumber : Output SPSS, 2017

Hasil uji pada Tabel 4.8 diperoleh nilai D-W (*Durbin-Waston*) sebesar 1,306, kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dl dan du. Nilai dl merupakan nilai *durbin-waston statictics upper*. Nilai dl dan du dapat dilihat dari tabel *durbin-waston* dengan $\alpha = 5\%$, Jumlah data (n) = 36, jumlah variabel independen (k) = 3. Maka ditemukan nilai $dl = 1.2953$ dan nilai $du = 1.6539$.

Dengan demikian setelah diperhitungkan dengan tabel *durbin-waston* pada Tabel 4.8 tersebut adalah sebesar 1,306 berada diantara nilai batas $dL < 4-dw > dU$ yaitu $1.2953 < 2.694 > 1.6539$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi

Hasil dari perhitungan data analisis *multiple linear regression* menggunakan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS 17.0 for Windows)*.

TABEL 4.9 HASIL UJI DTERMINASI (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	.660	.628	3127.466

Sumber : Output SPSS, 2017

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh perubahan variabel Kepatuhan Pajak, Setoran Pajak dan Pencairan Tunggakan, terhadap perubahan variabel Penerimaan Pajak. Dilihat dari table 4.9 diatas, nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,628 atau 62,8%, Artinya bahwa kepatuhan pajak, setoran pajak, pencairan tunggakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 62,8%, sisanya sebesar 37,2% dijelaskan oleh variabel atau faktor diluar model regresi yang tidak diuji dalam penelitian ini.

TABEL 4.10 HASIL UJI STATISTIK F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.063E8	3	2.021E8	20.663	.000 ^a
	Residual	3.130E8	32	9781045.683		
	Total	9.193E8	35			

Sumber : Output SPSS, 2017

Hasil perhitungan Uji-F dari tabel 4.10 diperoleh nilai F sebesar 20,663 dan nilai signifikan sebesar 0,000 atau 0%. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil signifikan $0,000 < 0,05$, dapat dikatakan bahwa pada model regresi semua variabel independen (kepatuhan pajak, setoran pajak dan pencairan tunggakan) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (penerimaan pajak).

TABEL 4.11 HASIL UJI STATISTIK T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11089.868	1717.857		6.456	.000
	Kepatuhan Pajak	.745	3.695	.024	.201	.842
	Setoran Pajak	1.358	.433	.495	3.134	.004
	Pencairan Tunggakan	5.302	2.013	.377	2.633	.013

Sumber : Output SPSS, 2017

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.11, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Pajak} = 11089.868 + 0,024 (X_1) + 0,495 (X_2) + 0,377 (X_3) + e$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila nilai jumlah kepatuhan pajak dan, setoran pajak, dan pencairan tunggakan adalah nol, maka nilai Penerimaan Pajak sebesar 11089.868. Berdasarkan persamaan regresi, dapat terlihat bahwa koefisien regresi kepatuhan pajak (X_1) sebesar 0,024 hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (nilai signifikansi $0.842 > 0,05$).

Setoran pajak yang diprosikan dengan SSP (X_2) memiliki nilai koefisien

regresi sebesar 0,495. Informasi tersebut memberitahukan bahwa setoran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (nilai signifikansi $0.004 < 0,05$)

Pencairan tunggakan (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,337. Informasi tersebut memberitahukan bahwa pencairan tunggakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (nilai signifikansi $0.013 < 0,05$).

2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan masing-masing variable bebas terhadap variable terikat secara parsial dengan menggunakan uji t yang dilihat dari nilai Prob. masing-masing variabel.

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat kita diketahui bahwa:

1. Nilai t hitung kepatuhan pajak sebesar 0,201 dengan signifikansi sebesar 0,842 yang berarti $>0,05$. Dengan demikian angka tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak maka H_0 diterima H_a ditolak.
2. Nilai t hitung ukuran setoran pajak sebesar 3,134 dengan signifikansi sebesar 0,004 yang berarti $< 0,05$. Dengan demikian angka tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara setoran pajak terhadap penerimaan pajak maka H_a diterima H_0 ditolak.
3. Nilai t hitung pencairan tunggakan sebesar 2,633 dengan signifikansi sebesar 0,013 yang berarti $<0,05$. Dengan demikian angka tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pencairan

tunggakan terhadap pengungkapan penerimaan pajak maka H_a diterima H_0 ditolak.

3. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan F

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 20,663 dengan tingkat signifikan P *value* sebesar 0.000 karena signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada model regresi semua variabel independen (kepatuhan pajak, setoran pajak dan pencairan tunggakan) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (penerimaan pajak).

4.4 Pembahasan

1. Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian alfan (2013) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, tidak hanya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dibutuhkan faktor pendukung lain dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Pelayanan yang maksimal akan meningkatkan dalam kesediaannya membayar pajak karena masyarakat akan dapat merasakan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar peraturan yang telah ditentukan.

2. Pengaruh Setoran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setoran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Warihanti (2014) yang menyatakan bahwa setoran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan pengertian Surat Setoran Pajak yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya membayar pajak terutang ke kas negara.

3. Pengaruh Pembayaran STP Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan tunggakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Patimah yang menyatakan pencairan tunggakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Menurut Waluyo (2003), Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak dibidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah setoran pajak, pembayaran STP terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat dibuktikan hipotesis pertama tidak terdukung, atau dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setoran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat dibuktikan hipotesis kedua terdukung, atau dapat dikatakan bahwa setoran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan tunggakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat dibuktikan hipotesis kedua terdukung, atau dapat dikatakan bahwa pencairan tunggakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapa hal yang dapat menjadi masukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Surabaya Simokerto dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor dan menyampaikan SPT-nya, serta dalam membayar pajak terhutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Surabaya Simokerto dapat melakukan sosialisasi mengenai manfaat memiliki NPWP, manfaat dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini hanya berfokus pada satu KPP untuk selanjutnya dapat mengembangkan dengan menambah objek penelitian. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya ditambahkan periode penelitian agar validitas data lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan pajak, setoran pajak, pencairan tunggakan penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain.